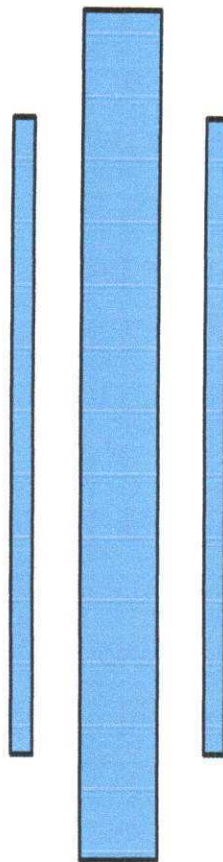
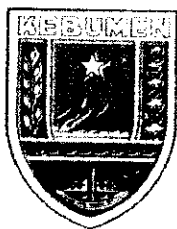




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KEC. KLIRONG
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan Klegenwonosari Nomor : -Telp.- Klirong 54381.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sistem ini juga mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya organisasi dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan masing-masing Instansi Pemerintah di dalam satu kerangka Sistem Akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini setiap Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen diwajibkan menyusun laporan pencapaian tujuan strategis organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik. Penyusunan LKjIP dalam SAKIP dilakukan melalui penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

LKjIP memiliki peran sebagai instrumen pengendali, penilaian kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance*. Untuk keperluan tersebut maka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata merupakan hal yang semestinya. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung berdasarkan kaidah hasil guna dan daya guna, akuntabel, dan bersih dari KKN.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada setiap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang ada.

Masing-masing pejabat struktural dan staf dibawahnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Konsep ini membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali.

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang nyata dan dapat dikendalikan oleh seseorang atau satu pihak yang diberi tugas. Dalam konsep ini terkandung perencanaan, pelaksanaan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dinilai oleh pihak berwenang. Sedangkan kegiatan yang tidak terkendali merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan akan tetapi masih dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan organisasi kepadanya yang harus dipertanggungjawabkan secara periodik. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas tersebut merupakan perwujudan dari kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan LKjIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya yaitu laporan harus dibuat secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu pelaporan harus memperhatikan:

1. Prinsip lingkungan pertanggungjawaban yaitu hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan.
2. Prinsip Prioritas yaitu yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban Instansi Instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjut.
3. Prinsip Manfaat yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari biaya penyusunannya, dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan kinerja Instansi yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini juga perlu diperhatikan ciri-ciri pelaporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan,

mudah dipahami (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Klirong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Selain kedudukan sebagai Kepala SKPD, Camat adalah Koordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani urusan perekonomian Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Klirong

No.	Jabatan	Eselon
1.	Camat	III.a
2.	Sekretaris Camat	III.b
3.	Kepala Seksi	IV.a
4.	Kepala Sub Bagian	IV.b

Camat membawahi Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dan Kepala Seksi sebanyak 4 seksi yaitu:

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
4. Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial.

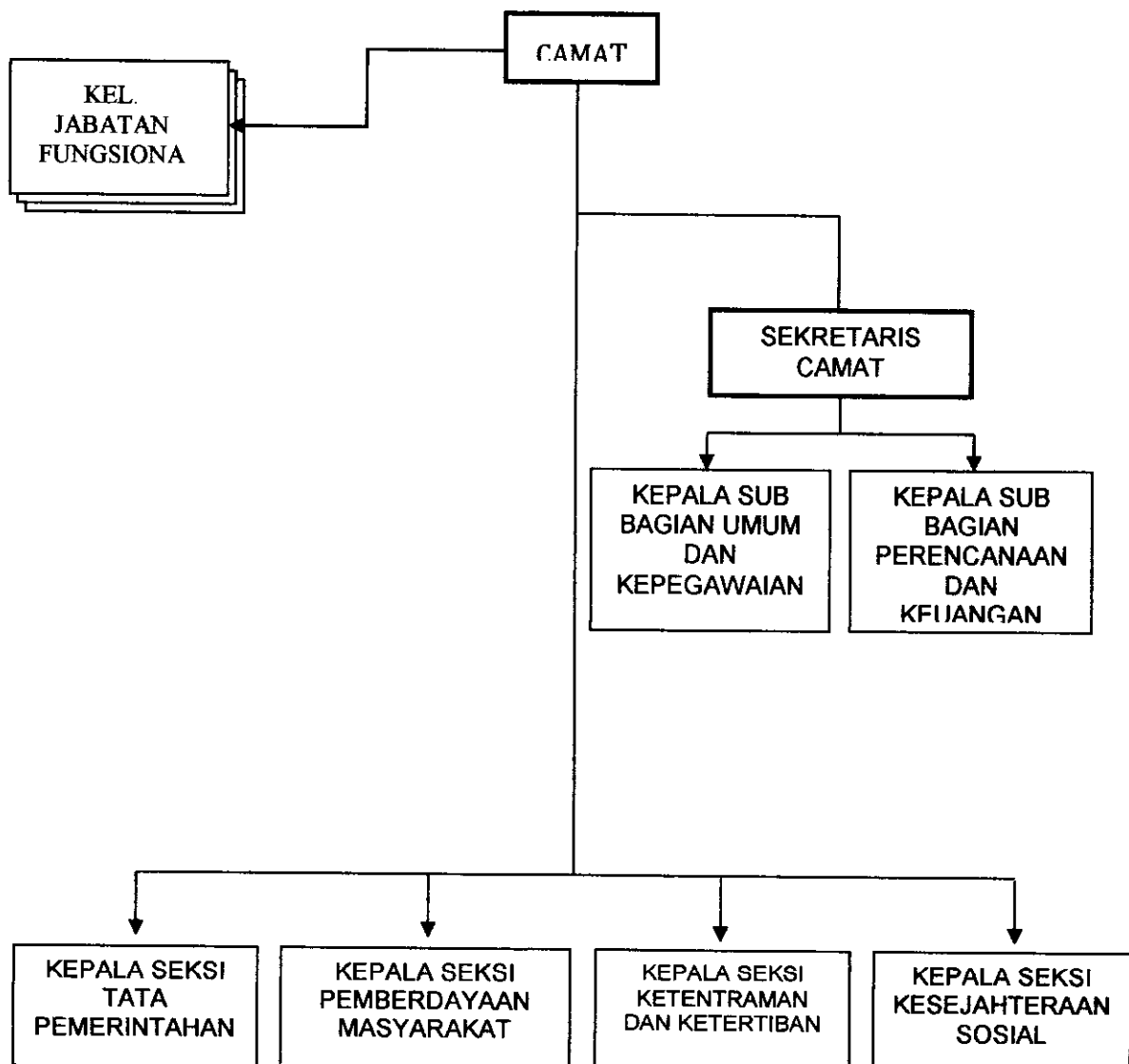
Sementara Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, di Kecamatan dimungkinkan adanya Jabatan Fungsional, tetapi sampai dengan saat ini belum ada realisasi pengisian jabatan tersebut.

Bagan organisasi Kecamatan Klirong dapat dilihat pada Gambar di bawah ini

Gambar 1.
Bagan Organisasi Kecamatan Klirong.



Aparatur Pemerintah Kecamatan Klirong pada tahun 2021 ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari Pejabat struktural sebanyak 8 orang dan staf sebanyak 2 orang dan 2 Orang Kepala Desa. Adapun susunan kepegawaian di Kantor Kecamatan Klirong sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Susunan Kepegawaian Kantor Kecamatan Klirong

No	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1 Orang
5.	Kasi Tata Pemerintahan	1 Orang
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Orang
7.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	1 Orang
8.	Kasi Pely.Umum dan Kesejahteraan Sosial	1 Orang
9.	Staf	2 Orang
11	Kepala desa PNS	2 Orang
	Jumlah	12 Orang

Adapun Jumlah Pegawai menurut golongan pangkat sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.3
Susunan Kepegawaian berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b	1 Orang
2.	Pembina	IV/a	2 Orang
2.	Penata Tingkat I,	III/d	2 Orang
3.	Penata,	III/c	3 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I,	III/b	2 Orang
5.	Pengatur I,	II/d	2 Orang
	Jumlah		12 Orang

C. Aspek Strategis/ Issue Strategis Organisasi

Untuk selalu tetap eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan berubah dengan cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus selalu terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan ini harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan ber kelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Klirong untuk kondisi lima tahun kedepan :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan SKPD yang semakin baik;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, standar pelayanan dan cakupan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh dengan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan kesejahteraan aparatur pemerintah; serta,
4. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (Stakeholders).

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang direncanakan secara analisis, realitis, rasional dan konprehensif. Strategi Pemerintahan Kecamatan Klirong untuk mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan maka strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Klirong adalah "Terwujudnya Kecamatan Sebagai Institusi Pelayanan Masyarakat Yang Profesional " dan "Koordinator Pembina Kewilayahan yang profesional dengan upaya pendekatan yang berprinsip dengan pemberdayaan masyarakat" dengan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Pemberian Pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi, peningkatan pembinaan/fasilitasi/monitoring dan evaluasi kepada pemerintah desa;

3. Penguatan Kapasitas kelembagaan kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat desa;
4. Pengembangan potensi sumber daya alam, perikanan, kelautan dan wisata.

Dari uraian di atas tentang visi, misi, arah kebijakan dan strategi kemudian dirumuskan *issue strategis* yang diformulasikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Klirong terhadap pelayanan publik yang mudah, cepat dan dapat terjangkau serta memiliki kualitas pelayanan yang prima;
2. Meningkatnya kebutuhan instansi Pemerintah akan aparatur yang memiliki kualifikasi memadai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
4. Meningkatnya potensi masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam antara lain sumber daya perikanan dan kelautan termasuk potensi pengembangan wisata di Kecamatan Klirong.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan ; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya : Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini.

2.1 Perencanaan Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Kecamatan Klirong berisi program-program Rencana program Kecamatan Klirong berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan satuan kerja perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di

masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Perumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasar urusan pemerintahan daerah. Gambaran pembagian urusan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

A. Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;

B. Rencana Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021 Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Sub Keg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a. Sub Keg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Sub Keg Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Sub Keg Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan;
 - d. Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Sub Keg Penyediaan Bahan/Material;
 - f. Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g. Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
 - c. Pengadaan Mebel.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Mebel;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan alat tulis kantor;
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
9. Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
11. Penyediaan makan dan minum;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
14. Pengadaan peralatan gedung kantor;
15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

16. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas;
18. Pengadaan mebeleur;
19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
20. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
21. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
22. Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
23. Fasilitasi TKP2KDes/ Kel;
24. Pembinaan sosial masyarakat;
25. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
26. Kegiatan pembinaan anggota Linmas;
27. Kegiatan Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan);
28. Fasilitasi APBDes;
29. Fasilitasi program pembangunan;
30. Pembinaan PKK;
31. Pelatihan keterampilan bagi pemuda;
32. Fasilitasi pemilihan kepala desa;
33. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
34. Penyelenggaraan Musrenbangcam.

Secara lengkap, daftar program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan kerangka pendanaannya dituangkan berdasarkan misi tujuan dan sasaran serta indikator kinerja daerah disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kec. Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021

Kode	Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
			Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		2017		2018		2019		2020		2021					
			Capaian 2015	Perkiraan Capaian 2016	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Bulanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	1.663.472.000	100%	1.698.049.000	100%	1.829.997.000	100%	1.909.547.000	100%	1.799.712.000	100%	8.906.777.000		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	10.590.000	11 Dokumen	10.790.000	11 Dokumen	11.000.000	11 Dokumen	11.300.000	11 Dokumen	11.700.000	55 Dokumen	55.200.000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah yang disusun (Renstra, Renja, RKV/DPA, RKPD/DPRA)	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	7.500.000	6 Dokumen	7.600.000	6 Dokumen	7.800.000	6 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	8.200.000	30 Dokumen	39.100.000		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKIP, LKSP, LPP, LK SKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000	5 Dokumen	3.100.000	5 Dokumen	3.200.000	5 Dokumen	3.300.000	5 Dokumen	3.500.000	25 Dokumen	16.100.000		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.364.550.000	12 Bulan	1.478.247.000	12 Bulan	1.520.747.000	12 Bulan	1.566.247.000	12 Bulan	1.523.747.000	60 Bulan	7.526.735.000		
7.01.01.2.02.01	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang mendapatkan Tamzil	13 Orang	13 Orang	13 Orang	1.340.550.000	13 Orang	1.453.747.000	13 Orang	1.495.747.000	13 Orang	1.540.747.000	13 Orang	1.497.747.000	65 orang	7.401.735.000		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.02.02	Pemediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah orang yang melaksanakan rakor dan konsultasi	0	15 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15 orang	-		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penunjabarhan dan Penyajian/Kerfias Keunggulan SKPD	Jumlah orang pejabat administrasi keuangan, Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	7 Orang, 3 Jenis	24.000.000	7 Orang, 3 Jenis	24.500.000	7 Orang, 3 Jenis	25.000.000	7 Orang, 3 Jenis	25.500.000	7 Orang, 3 Jenis	26.000.000	35 Orang, 3 Jenis	125.000.000		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	61.500.000	12 Bulan	45.088.000	12 Bulan	66.900.000	12 Bulan	70.100.000	12 Bulan	52.165.000	60 Bulan	295.753.000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Perangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi/ perangan bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	6.000.000	4 Jenis	6.200.000	4 Jenis	6.400.000	4 Jenis	6.600.000	4 Jenis	6.800.000	4 Jenis	32.000.000		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	23.000.000	60 Bulan	106.500.000		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan pengabdian	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	14.000.000	12 Bulan	14.400.000	12 Bulan	14.800.000	12 Bulan	15.200.000	12 Bulan	15.600.000	60 Bulan	74.000.000		Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah jenis penyediaan bahan baku dan perawatan perundang-undangan (Suara Merdeka, Kebumen Ekspres dan Tabloid)	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	2.500.000	1 Jenis	2.600.000	1 Jenis	2.700.000	1 Jenis	2.800.000	1 Jenis	3.000.000	1 Jenis	13.600.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Barang	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	16.500.000	12 Bulan	17.000.000	12 Bulan	17.500.000	12 Bulan	18.000.000	60 Bulan	85.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	4 orang/kali	4 orang/kali	6 orang/kali	3.000.000	8 orang/kali	4.000.000	10 orang/kali	5.000.000	12 orang/kali	6.000.000	14 orang/kali	7.000.000	50 Orang/kali	25.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemertintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Pemertintah Daerah	11 Unit	22 Unit	4 Unit	49.000.000	19 Unit	52.000.000	8 Unit	41.200.000	18 Unit	44.950.000	10 Unit	109.750.000	66 Unit	296.900.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	3 Unit	-	1 Unit	-	10 Unit	14.000.000	-	-	4 Unit	10.950.000	4 Unit	11.250.000	19 Unit	71.200.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan perbaikan gedung kantor	5 Unit	4 Unit	3 Unit	-	4 Unit	20.000.000	3 Unit	21.200.000	4 Unit	22.000.000	2 Unit	22.500.000	16 Unit	99.700.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 Unit	18 Unit	-	-	5 Unit	18.000.000	6 Unit	20.000.000	10 Unit	12.000.000	8 Unit	16.000.000	29 Unit	66.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemungut Uraan Pemertintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemungut Uraan Pemertintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	41.000.000	12 Bulan	44.100.000	12 Bulan	45.150.000	12 Bulan	46.250.000	12 Bulan	47.850.000	12 Bulan	226.350.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.000.000	12 Bulan	3.100.000	12 Bulan	3.150.000	12 Bulan	3.250.000	12 Bulan	3.350.000	60 Bulan	15.850.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	20.500.000	12 Bulan	21.000.000	12 Bulan	21.500.000	12 Bulan	22.000.000	12 Bulan	22.500.000	60 Bulan	107.500.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	12 Bulan, 1 Orang	19.500.000	12 Bulan, 1 Orang	20.000.000	12 Bulan, 1 Orang	20.500.000	12 Bulan, 1 Orang	21.000.000	12 Bulan, 1 Orang	22.000.000	60 Bulan, 1 Orang	103.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Uraan Pemertintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemertintahan Daerah	26 Unit	32 Unit	37 Unit	61.725.000	36 Unit	67.914.000	37 Unit	145.000.000	33 Unit	170.700.000	38 Unit	54.500.000	181 Unit	499.839.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas operasional	8 Unit	10 Unit	10 Unit	28.000.000	10 Unit	29.000.000	10 Unit	30.000.000	10 Unit	31.000.000	12 Unit	32.000.000	52 Unit	150.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rehin/berkala mebel	5 Unit	5 Unit	5 Unit	2.000.000	4 Unit	2.500.000	4 Unit	3.000.000	4 Unit	3.200.000	4 Unit	3.500.000	21 Unit	14.200.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya	11 Unit	15 Unit	20 Unit	14.725.000	20 Unit	15.000.000	22 Unit	16.000.000	18 Unit	16.500.000	20 Unit	17.000.000	100 Unit	79.225.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	17.000.000	2 Unit	4.000.000	1 Unit	96.000.000	1 Unit	120.000.000	2 Unit	2.000.000	8 Unit	239.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	71.753.000	100%	72.800.000	100%	74.000.000	100%	75.200.000	100%	76.500.000	100%	370.233.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	71.753.000	6 Jenis	72.800.000	6 Jenis	74.000.000	6 Jenis	75.200.000	6 Jenis	76.500.000	6 Jenis	370.253.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Keluarga, Surat Kematian, Pindah Dalam,), Jumlah THL PATRY yang terlayani	5 Jenis, 3 Orang	5 Jenis, 3 Orang	5 Jenis, 3 Orang	71.753.000	5 Jenis, 3 Orang	72.800.000	5 Jenis, 3 Orang	74.000.000	5 Jenis, 3 Orang	75.000.000	5 Jenis, 3 Orang	76.000.000	5 Jenis, 3 Orang	355.253.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Daerah	100%	100%	100%	14.000.000	100%	14.500.000	100%	15.000.000	100%	15.500.000	100%	16.000.000	100%	75.000.000		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.500.000	2 Kegiatan	15.000.000	2 Kegiatan	15.500.000	2 Kegiatan	16.000.000	10 Kegiatan	75.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Kawasan Kebudayaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengendalian Puncaknya, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika Serta Peningkatan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah rangkaian kegiatan dalam rangka HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14.000.000	2 Kegiatan	14.500.000	2 Kegiatan	15.000.000	2 Kegiatan	15.500.000	2 Kegiatan	16.000.000	10 Kegiatan	75.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06	Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	123.500.000	100%	141.900.000	100%	140.900.000	100%	174.900.000	100%	153.300.000	100%	733.900.000		
7.01.06.2.01	Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	123.500.000	24 Desa	141.900.000	24 Desa	140.900.000	24 Desa	174.900.000	24 Desa	153.300.000	120 Desa	733.900.000		
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengisian Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengisian keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	42.000.000	24 Desa	44.000.000	24 Desa	46.000.000	24 Desa	48.000.000	24 Desa	50.000.000	120 Desa	220.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.04	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala Desa	0	0	0		2 Desa	8.000.000	0		22 Desa	28.000.000	0		24 Desa	36.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.05	Rekomendasi Pembentukan dan Pengangkatan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pembentukan dan Pengangkatan Perangkat Desa	2 Desa	4 Desa			6 Desa	3.500.000	6 Desa	4.000.000	6 Desa	4.000.000	6 Desa	4.000.000	24 Desa	15.500.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, Jumlah Raker sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 Dokumen, 2 Kall	2 Dokumen, 2 Kall	2 Dokumen, 2 Kall	15.500.000	2 Dokumen, 2 Kall	15.700.000	2 Dokumen, 2 Kall	16.000.000	2 Dokumen, 2 Kall	16.200.000	2 Dokumen, 2 Kall	16.500.000	10 Dokumen, 10 Kall	79.900.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Kemitraan dan Kerohanian Umum	Jumlah desa yang di fasilitasi penyelenggaraan kemitraan dan kerohanian umum, Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kemitraan dan kerohanian umum	24 Desa, 0 Kall	24 Desa, 1 Kall	24 Desa, 1 Kall	6.000.000	24 Desa, 1 Kall	6.200.000	24 Desa, 1 Kall	6.400.000	24 Desa, 1 Kall	6.600.000	24 Desa, 1 Kall	6.800.000	120 Desa, 5 Kall	32.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.13	Fasilitas Penyusunan Pencapaian Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musembangdes/kef	24 Desa	24 Desa	24 Desa	28.000.000	24 Desa	30.000.000	24 Desa	31.000.000	24 Desa	32.000.000	24 Desa	34.000.000	120 Desa	155.000.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
7.01.06.2.01.16	Fasilitas Penyusunan Program dan Puklisan Pendorong	Jumlah kegiatan musembanggram	2 kali	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 kali	130.500.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen
		Jumlah Pembinaan PKK	24 Desa	4 Kegiatan	4 Kegiatan	22.000.000	4 Kegiatan	24.000.000	4 Kegiatan	26.500.000	4 Kegiatan	28.000.000	4 Kegiatan	30.000.000	20 Kegiatan	130.500.000	Kecamatan Kiriwang	Kabupaten Kebumen

2.2 Perjanjian Kinerja

Adapun perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah dilakukan perubahan 2 kali Kantor Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen termuat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN II TAHUN 2021
OPD KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Kecamatan.	- Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan - Capaian Indeks nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	100% 6 Keg. 20 Sub Keg. 83,50	100% 6 Keg. 20 Sub Keg. 84,00	27,6 % 83,7 5	28,8 % 83,7 5	28,2 % 84,3 2	15,2 % 84,3 2
2.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra, RKA, Renja, DPA, LKjIP, LPPD, DALEV, RKAP, DPPA)	100% 2 Sub Keg. 8 Dok.	100% 2 Sub Keg. 9 Dok.	50% 3 dok.	25% 2 dok	25% 4 dok	-
3.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100% 2 Sub Keg. 12 Bulan 15 Orang	100% 2 Sub Keg. 12 Bulan 15 Orang	25,0 3% 3 bln	30,6 5% 3 bln	30,2 9% 3 bln	14,0 3% 3 bln
4.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100% 6 Sub Keg. 12 Bulan	100% 6 Sub Keg. 12 Bulan	24,8 1% 3 bln	26,6 7% 3 bln	25,4 0% 3 bln	23,1 1% 3 bln
5.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit/paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100% 3 Sub Keg. 7 Paket	100% 2 Sub Keg. 6 Paket	100 % 6 Pkt	-	-	-

6.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 3 Sub Keg. 12 Bulan	100% 3 Sub Keg. 12 Bulan	27,5 7% 3 bln	22,8 9% 3 bln	25,2 1% 3 bln	24,3 1% 3 bln
7.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 4 Sub Keg 37 Unit	100% 4 Sub Keg 37 Unit	15% 10 Unit	30% 6 Unit	40% 12 Unit	15% 9 Unit
8.	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	100% 2 Sub Keg 6 Jenis 12 Bulan	100% 2 Sub Keg 6 Jenis 12 Bulan	26,1 2% 6 jenis	25,3 3% 6 jenis	25,3 1% 6 jenis	23,2 4% 6 jenis
9.	Terselenggaranya monitoring dan supervisi Posko PPKM Mikro Desa dan berfungsinya posko penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang termonitoring pelaksanaan PPKM Mikro dan jumlah kegiatan di Posko Penanganan Covid-19 kecamatan	0	100% 24 Desa 4 Kali	15%	52% 3 kali	20% 1 kali	13%
10.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Penambahan wawasan kebangsaan masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	100% 1 Sub Keg. 3 keg	100% 1 Sub Keg. 2 keg	-	-	100% 2 keg	-
11. a.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang Terbina dan Terawasi Pemerintahan Desanya	100% 6 Sub Keg. 24 Desa	100% 6 Sub Keg. 24 Desa	26,4 6% 24 Desa	12,4 2% 24 Desa	57,7 5% 24 Desa	3,77 % 24 Desa
b.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tertatanya data Kemiskinan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat: PKK, Kepemudaan, Sosial Masyarakat dan Pembinaan UKS, entri data kemiskinan	100% 24 Desa 8 Keg.	100% 24 Desa 7 Keg.	25% 2 Keg	25% 2 Keg	25% 1 Keg	25% 2 Keg
c.	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa dan jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100% 24 Desa 2 Keg	100% 24 Desa 1 Keg	-	-	100% 1 Keg	-

d.	Terlaksananya Fasilitasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	100% 24 Desa 3 Keg	100% 24 Desa 2 Keg	-	-	30% 1 Keg	70% 1 Keg
----	---	---	--------------------------	--------------------------	---	---	--------------	--------------

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN *
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12.160.000,-	12.160.000,-	2 Sub Kegiatan
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.462.817.000,-	1.492.156.000,-	2 Sub Kegiatan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.500.000,-	55.540.000,-	6 Sub Kegiatan
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.500.000,-	64.000.000,-	2 Sub Kegiatan
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.500.000,-	36.500.000,-	3 Sub Kegiatan
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.712.000,-	41.712.000,-	4 Sub Kegiatan
7.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.500.000,-	60.500.000,-	2 Sub Kegiatan
8.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum/ Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum		0,- 32.218.000,-	1 Sub Kegiatan
9.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.000.000,-	4.722.000,-	1 Sub Kegiatan
10.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	113.900.000,-	112.420.000,-	6 Sub Kegiatan

Jumlah : 5 Program/ 10 Kegiatan	1.882.589.000,-	1.911.928.000,-	29 Sub Kegiatan
	4 Program/9 Kegiatan	5 Program/ 10 Kegiatan	

Kebumen, 3 September 2021

CAMAT KLIRONG



EKO PURWANTO, S.STP., M.SI

NIP. 197901161998101001

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Secara umum Pemerintah Kecamatan Klirong sudah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2016-2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun anggaran 2021 terdapat 1 Indikator Kinerja Utama dan 13 sasaran yang ingin dicapai dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klirong Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Prosentase (%)
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah	- Prosentase Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan	84,00%	84,32%	100,38%
	- Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	B	B	

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra, RKA, Renja, DPA, LKjIP, LPPD, DALEV, RKAP, DPPA)	9 Dokumen	9 Dokumen	100

Sasaran Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra, RKA, Renja, DPA, LKjIP, LPPD, DALEV, RKAP, DPPA) dengan target tahun 2021 sejumlah 9 Dokumen, terealisasi sebanyak 9 Dokumen atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran mencapai 98,76 % dari pagu Rp. 12.160.000,- terealisasi 12.010.000,-.

Tabel 3.3
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan.	12 Bulan.	100%

Sasaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja berupa jumlah bulan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target tahun 2021 sejumlah 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan 92,19%, dari pagu Rp. 1.492.156.000,- terserap 1.375.655.224,-. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN terdapat sisa anggaran sebanyak 116.356.776,- dikarenakan kebutuhan riil anggaran berdasarkan jumlah ASN di Kecamatan Klirong.

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan.	12 Bulan.	100%

Sasaran Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah bulan kegiatan administrasi umum perangkat daerah SKPD Kecamatan Klirong dengan target tahun 2021 sejumlah 12 Bulan, terealisasi sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 100%, dari anggaran Rp. 55.540.000,- terserap Rp. 55.540.000,-.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terselamatnya Dokumen/Arsip Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	ANGGARAN %
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit/paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Paket.	6 Paket.	100%

Sasaran Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah unit/paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah OPD Kecamatan Klirong dengan target tahun 2021 sejumlah 6 Paket, terealisasi sebanyak 6 Paket atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 100%, dari anggaran Rp. 60.858.000,- terserap Rp. 60.858.000,-.

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI I	ANGGARAN %
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%

Sasaran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. dengan indikator kinerja berupa Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target tahun 2021 sejumlah 12 Bulan, terealisasi sebanyak 12 Bulan atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 84,56%, dari anggaran Rp. 36.500.000,- terserap Rp. 30.864.452,-. Di anggaran belanja langganan listrik Cuma terserap 66,82% berdasarkan kebutuhan riil yang ada.

Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37 Unit	37 Unit	100%

Sasaran Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target tahun 2021 sejumlah 37 Unit, terealisasi 37 Unit atau sebesar 100%. Untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,13%. Dari anggaran Rp. 41.712.000,- terserap Rp. 41.352.565,-.

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	6 Jenis	6 Jenis	100%

Sasaran terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja berupa Jenis urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan sejumlah 6 Jenis Kegiatan, terealisasi 6 Jenis kegiatan tersebut yaitu KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, dan Pelayanan Non Perizinan lainnya atau sebesar 100%. Dan untuk penyerapan anggaran sejumlah 96,09%, dari anggaran Rp. 60.500.000,- terserap Rp. 58.137.000,-.

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terselenggaranya monitoring dan supervisi Posko PPKM Mikro Desa dan
berfungsinya posko penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya monitoring dan supervisi Posko PPKM Mikro Desa dan berfungsinya posko penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang termonitoring pelaksanaan PPKM Mikro dan jumlah kegiatan di Posko Penanganan Covid-19 kecamatan	24 desa	24 desa	100%

Sasaran Terselenggaranya monitoring dan supervisi Posko PPKM Mikro Desa dan berfungsinya posko penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja berupa Jumlah Desa yang termonitoring pelaksanaan PPKM Mikro dan jumlah kegiatan di Posko Penanganan Covid-19 kecamatan dengan target tahun 2021 sejumlah 24 desa , terealisasi sebanyak 24 desa atau sebesar 100%. Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 92,26%. dari anggaran Rp. 32.218.000,- terserap Rp. 29.724.000,-.

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Penambahan wawasan kebangsaan masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

Sasaran Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja berupa Jumlah Kegiatan dalam Penambahan wawasan kebangsaan masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa Kecamatan Tahun 2021 dengan target kinerja yaitu 2 Kegiatan, terealisasi sebanyak 2 Kegiatan yaitu Peringatan HUT RI dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Kebumen atau sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran sejumlah, 100%. dari anggaran Rp. 4.722.000,- terserap Rp. 4.722.000,-.

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja Sasaran
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang Terbina dan Terawasi Pemerintahan Desanya	24 Desa	24 Desa	100%

Sasaran Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja berupa Jumlah desa yang Terbina dan Terawasi Pemerintahan Desanya

dengan target tahun 2021 sejumlah 24 desa, terealisasi sebanyak 24 desa atau sebesar 100%. dan untuk realisasi penyerapan anggaran sejumlah 92,55 % dari anggaran Rp. 38.470.000,- terserap Rp. 35.758.000,-. Sasaran tersebut diwujudkan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Tabel 3.12

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tertatanya data Kemiskinan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tertatanya data Kemiskinan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat: PKK, Kepemudaan, Sosial Masyarakat dan Pembinaan UKS, entri data kemiskinan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%

Sasaran Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tertatanya data Kemiskinan dengan indikator kinerja berupa Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat: PKK, Kepemudaan, Sosial Masyarakat dan Pembinaan UKS, entri data kemiskinan dengan target tahun 2021 sejumlah 7 Kegiatan, yaitu PKK 2 Kegiatan, Kepemudaan 1 Kegiatan, Pembinaan Sosial Masyarakat 1 Kegiatan dan Pembinaan UKS 1 Kegiatan, entri DTKS/data kemiskinan 2 Kegiatan, terealisasi sebanyak 7 Kegiatan atau sebesar 100%. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar 93,73% dari anggaran Rp. 25.600.000,- terserap Rp. 23.996.500,-.

Tabel 3.13

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Terlaksananya Fasilitasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Partisipatif**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya Fasilitasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

Sasaran Terlaksananya Fasilitasi, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan indikator kinerja berupa terselenggaranya Musrenbangdes pada 24 desa dan Musrenbangcam dengan target tahun 2021 sebanyak 2 Kegiatan terealisasi sebanyak 2 Kegiatan yaitu Musrenbangcam dan Musrenbangdes atau tercapai target sebesar 100 %, untuk realisasi anggaran sebesar 99,06 % dari anggaran Rp. 28.320.000,- terserap Rp. 28.055.000,-.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran tersebut dalam Tahun 2021 Kecamatan Klirong memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 1.911.928.000,- (Satu milyar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian untuk Belanja pegawai sebesar Rp. 1.509.198.000,- (Satu milyar lima ratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 341.872.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 60.858.000,- (Enam puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Adapun Realisasi keuangan tahun 2021 untuk Belanja pegawai sebesar Rp. 1.390.189.224,- (Satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) dan Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 326.896.517,- (Tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 60.858.000,- (Enam

puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). sebagian efisiensi belanja di kegiatan lain Tahun Anggaran 2021.

Realisasi anggaran per-program dan per-kegiatan di OPD Kecamatan Klirong Tahun Anggaran 2021 termuat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Per-Program

URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2021	REALISASI T.A. 2021	PROSENTAS E %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.702.068.000	1.579.422.241	92,79
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.160.000	12.010.000	98,76
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.160.000	7.010.000	97,91
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.492.156.000	1.375.655.224	92,19
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.474.806.000	1.358.449.224	92,11
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.350.000	17.206.000	99,17
Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.540.000	55.540.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	12.000.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000	14.000.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	100
Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	20.000.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.040.000	1.040.000	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.000.000	64.000.000	100
Pengadaan Mebel	-	-	-

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	30.000.000	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.000.000	34.000.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.500.000	30.864.452	84,56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.950.000	99,83
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000	10.926.452	66,82
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.000.000	16.988.000	99,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.712.000	41.352.565	99,13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000	26.666.565	98,76
Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.974.000	98,70
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.712.000	10.712.000	87,27
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000	2.000.000	87,27
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.500.000	58.137.000	96,09
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.500.000	58.137.000	96,09
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.500.000	572.000	22,88
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	58.000.000	57.565.000	99,25
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	32.218.000	29.724.000	92,26
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.218.000	29.724.000	92,26
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	32.218.000	29.724.000	92,26
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.722.000	4.722.000	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.722.000	4.722.000	100

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	4.722.000	4.722.000	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	112.420.000	106.198.500	94,46
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.420.000	106.198.500	94,46
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.470.000	35.758.000	92,55
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.180.000	11.539.000	87,55
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.850.000	6.650.000	97,08
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.320.000	28.055.000	99,06
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.000.000	17.296.500	96,09
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.600.000	6.700.000	88,16
Jumlah Belanja	1.911.928.000,00	1.777.943.741,00	92,99

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Klirong Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Klirong telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 1 Indeks Kinerja Utama Kecamatan Klirong dan 13 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Klirong Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai Target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2021 pada hakekatnya berkat hasil kerjasama yang baik antara Kecamatan Klirong dengan UPTD/B dan Pemerintahan Desa di Kecamatan Klirong.

Namun disadari bahwa tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala antara lain pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut Kecamatan Klirong senantiasa akan membenahi kinerja pelayanan publik di masa yang akan datang

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan LKjIP Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini. Tentu saja banyak hal yang masih perlu disempurnakan, untuk itu kami mohon masukan dan saran dari semua pihak terkait.

Kebumen, 28 Januari 2022

CAMAT KLIRONG ✎
EKO PURWANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19790116 199810 1 001.